



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 874/VIII/2015

I/AGUSTUS 2015



PENGAMANAN PILKADA SERENTAK HARUS DIMAKSIMALKAN



Pengamanan Pilkada Serentak Harus Dimaksimalkan



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin didampingi Kapolda Sumsel memberi keterangan pers

Tim Komisi III DPR dipimpin Ketua Komisi Aziz Syamsudin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan Senin (27/7). Selama di Provinsi ini Tim Komisi III DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel, Kapolda, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Kakanwil Hukum dan HAM, dan Kepala BNN Provinsi Sumsel.

Salah satu masalah yang dibahas dalam pertemuan ini adalah masalah keamanan Pilkada. “Kami minta dalam rangka masa pendaftaran mulai tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 ini pihak keamanan dalam hal ini Kapolda harus

siap termasuk pengamanan Pilkada serentak nanti yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015,” ungkap Aziz Syamsudin.

Komisi III DPR RI minta pengamanan pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan pada 9 Desember 2015 harus dimaksimalkan supaya berlangsung sukses. Menurut dia, untuk sukseskan pemilihan kepala daerah itu, maka salah satunya pengamanan harus diutamakan, mulai dari proses hingga pasca pemilihan terutama dari aparat kepolisian.

Di Sumsel sendiri ada tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada yakni

Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musirawas, dan dua daerah pemekaran yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan Musirawas Utara (Muratara).

Terkait dengan masalah-masalah dukungan sarana, prasarana dan dana untuk operasional masih belum final 100% meski ada yang sudah dipenuhi (*full*). Dia berharap kekurangan itu bisa digerakan dan kepada KPU bisa segera menyelesaikan khususnya di Provinsi Sumsel yang akan melaksanakan 7 Pilkada serentak.

“Mudah-mudahan dalam bulan Agustus mendatang sudah turun sehingga pengamanan pilkada bisa berjalan dengan baik,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Kapolda Provinsi Sumsel Irjen Pol. Iza Fadri mengatakan jajarannya siap meminimalisir tindak kriminal yang terjadi di daerah ini. Memang, lanjutnya, ada beberapa kasus yang menonjol yang terjadi di daerah ini sehingga pihaknya terus meminimalisir.

“Kita sudah siap melaksanakan Pilkada setentak, baik dalam konteks operasional maupun anggaran meliputi 7 kabupaten. Kita ajukan rata-rata sudah terpenuhi sekitar 76%, ada memang satu daerah seperti Musi Rawas yang masih 40% tapi kita masih mengupayakan supaya anggaran ini bisa terpenuhi,” tegas Iza Fadri.

Untuk pengamanan Pilkada, lanjut dia, sudah disampaikan kepada para Kapolres dan ditandaskan tidak ada alasan untuk tidak mengamankan. Artinya ketika anggaran itu tidak dipenuhi sesuai dengan yang diajukan maka Polres melakukan upaya bagaimana mencukupkan anggaran itu. (iw)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Pimpinan DPR Hadiri Rapat Konsultasi Di Istana Bogor



Pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara saat pertemuan konsultasi bersama Presiden dan Wapres

Pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara Rabu (5/8/2015) pukul 10.00, menghadiri pertemuan konsultasi bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersama para menteri Kabinet Kerja di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat.

Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang hadir adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua MK Arif Hidayat, dan Ketua KY Suparman Marzuki. Acara konsultasi tersebut merupakan rangkaian agenda kenegaraan menjelang hari ulang tahun ke 70

Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam konsultasi ini dibahas Sidang Paripurna DPR sebagai rangkaian acara menyambut dan merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-70 pada 17 Agustus 2015 dan Penyampaian RAPBN 2016 beserta Nota Keuangannya oleh Presiden.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang ikut mendampingi Ketua DPR dalam acara ini mengatakan, pihaknya akan membuka peluang adanya pembahasan selain soal Sidang Tahunan. Salah satu yang paling mungkin dibahas adalah soal Perppu Pilkada. "Belum tahu pasti juga, diantara temanya

soal Pidato Kenegaraan Presiden, Nota Keuangan dan RAPBN 2016 serta sebagian isu soal Pilkada Serentak. Karena itu kami mencoba akan beritahu ke Presiden apa yang bisa diambil untuk keputusan tuntas. Kalau bikin Perppu pun jangan Perppu yang dipikir sendiri," ungkap Fahri.

Fahri mengatakan Pimpinan DPR membicarakan masalah Pilkada kepada Presiden Jokowi, agar dikeluarkan keputusan untuk menyelesaikan masalah itu secara tuntas. (skr) foto: jaka/parle/iw

Rekomendasi Bawaslu Tidak Bertentangan dengan UU

Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah selesai menghadiri Rapat Konsultasi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (5/8) menyampaikan bahwa, terkait dengan calon tunggal, telah disepakati bahwa KPU akan memperpanjang masa

pendaftaran calon selama seminggu. Hal itu sesuai dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu untuk KPU.

"Terkait teknis waktu kapan waktu perpanjangan waktunya, kami serah-

kan kepada KPU untuk segera menginformasikan kepada publik kapan perpanjangan waktu tersebut," ungkap Fadli.

Hingga batas pendaftaran pilkada serentak berakhir tanggal 3 Agustus,

sebanyak 7 daerah hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Daerah-daerah tersebut berpotensi gagal ikut serta dalam Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember mendatang. Selain itu, masih ada 83 daerah yang berpotensi memiliki satu pasangan bakal calon.

Pasalnya, di daerah itu, hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar. Jika salah satu pasangan bakal calon itu tidak lolos verifikasi sehingga hanya ada satu calon, KPU akan kembali membuka pendaftaran. Namun, jika tak ada pendaftar baru, berarti di daerah itu hanya ada satu pasangan calon.

Menyikapi hal tersebut Bawaslu telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada KPU. Salah satu opsi yang dikeluarkan adalah meminta KPU untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah.

Menurut Fadli, opsi menggunakan jalur rekomendasi Bawaslu tidak bertentangan dengan Undang-undang. Pilkada jalur rekomendasi tersebut merupakan suatu upaya untuk mengisi celah yang tidak diatur oleh Undang-

undang.

“Sebenarnya DPR telah mengantisipasi adanya celah aturan dalam UU Pilkada soal calon tunggal. Pada saat itu, DPR ingin mengisi celah dengan melakukan revisi UU Pilkada, namun hal itu ditolak oleh pemerintah,” tegas Fadli.

Sementara itu mengenai opsi Perppu, Fadli menilai, DPR tidak setuju Presiden Jokowi mengeluarkan opsi itu. Karena opsi itu dinilai justru bisa menimbulkan kegaduhan jika nanti DPR menolak Perppu disahkan menjadi UU. Selain itu penerbitan Perppu justru akan berimplikasi hukum yang sangat besar.

“Kalau ditolak maka terjadi kecacauan, malah calon itu batal menjadi calon karena dibatalkan oleh proses politik yang ada. Jadi kita menghindari itu. Karena itu lebih bagus konsisten terhadap aturan yang sudah dibuat sekarang ini melalui PKPU, tinggal masalah teknis perpanjangan waktu saja yang itu akhirnya kita sepakati dan itu saya kira masih di dalam satu koridor yang tidak mengganggu aturan yang ada,” tutup Fadli.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Jika dalam waktu kurun perpanjangan masa pendaftaran selama seminggu, daerah yang hanya memiliki satu pasang calon tidak memiliki tambahan pasangan calon maka daerah tersebut akan ditunda untuk mengikuti Pilkada Serentak 2015 dan akan diundur pada pelaksanaan Pilkada 2017.

(skr) foto: jaka/parle/iw

Ketua DPR Sarankan Presiden Tak Terbitkan Perppu Pilkada



Ketua DPR RI Setya Novanto

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak telah dilaksanakan KPU hingga dua gelombang namun berdasarkan data KPU, hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran pilkada pada Senin (3/8/2015), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, masih ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki satu

pasangan bakal calon.

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, masih ada 83 daerah yang berpotensi memiliki satu pasangan bakal calon. Pasalnya, di daerah itu, hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar. Jika salah satu pasangan bakal calon itu tidak lolos verifikasi sehingga hanya ada satu calon, KPU akan kembali membuka pendaftaran. Namun, jika tak ada pendaftar baru, berarti di daerah itu hanya ada satu pasangan calon.

KPU mencatat terdapat 838 pasangan calon yang diterima pendaftarannya dengan rincian 21 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 115 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, dan 702 pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Ketua DPR RI Setya Novanto ditemui pers sebelum menghadiri Rapat Konsultasi di Istana Bogor, Rabu (5/08/2015) menyampaikan agar dilakukan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah yang hanya memiliki satu calon kepala



daerah. Ia menyampaikan itu dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015.

“Kita sarankan untuk bisa semuanya (Pilkada di tujuh daerah) itu bisa kita tunda. Kalau tidak bisa berimplikasi terhadap masalah-masalah hukum,” kata Novanto.

“UU Pilkada dan PKPU telah mewajibkan bahwa Pilkada harus diikuti lebih

dari satu pasang calon kepala daerah. Daerah yang tidak memenuhi aturan itu, maka pelaksanaan Pilkadaanya ditunda sampai 2017,” terang Novanto.

“Kita melihat semua itu berdasarkan aturan yang ada, minimal pesertanya harus dua pasangan calon,” lanjutnya.

Pemerintah telah menyiapkan draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk meniyasati adanya calon tunggal dalam

Pilkada serentak 2015. Selanjutnya, hal itu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo apakah akan menerbitkan perppu atau tidak.

Terkait dengan rencana penerbitan Perppu Pilkada, Novanto menyarankan agar tidak diterbitkan karena akan berimplikasi yang sangat besar dan akan memakan waktu yang panjang.

(skr) foto: denus/parle/iw

Fahri Tanggapi Rencana Dikeluarkannya Perppu

Disela-sela acara halal bihalal yang diselenggarakan Selasa (4/8) Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah menjawab berbagai pertanyaan dari para wartawan. Salah satunya terkait rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, dan kemungkinan dikeluarkannya Perppu oleh presiden.

“Dari awal UU Pilkada lahir dari situasi yang tidak ideal, dan Perppu juga bukan sebuah produk peraturan yang ideal, sehingga jika kemudian dari UU Pilkada melahirkan Perppu maka akan menimbulkan masalah lain,” jelas Fahri.

Sebelumnya menurut Fahri, pihaknya telah mengatakan kepada Presiden bahwa akan ada tiga masalah, yakni sebelum Pilkada, saat Pilkada dan setelah Pilkada. Masalah sebelum Pilkada diungkapkan Fahri seperti adanya calon tunggal, selain itu juga masalah calon kepala daerah dari partai yang sedang berselisih kepengurusan, yang menurutnya, semua itu dipenuhi dengan drama politik yang luar biasa.

“Belum lagi masalah saat Pilkada, serta masalah setelah Pilkada, jika ada sengketa Pilkada, siapa yang akan menangani. Melihat ketidaksempurnaan dan ketidakidealan itu kita tidak bisa titip ke presiden untuk membuat Perppu,” paparnya.

Dilanjutkannya, jika terus menyelesaikan masalah lewat keluarnya Perppu, maka itu akan menjadi bom waktu yang cukup membahayakan di masa mendatang.

“Seperti tambal ban, maka penambalannya itu perlu berhati-hati, karena tambalannya bisa pecah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Fahri meminta maaf karena belum bisa membalas SMS, BBM, atau WA dari teman-teman



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

wartawan. “Saya memang sedang itikaf. Halal bihalal buat saya ya bersalam-salaman secara langsung seperti ini. Semoga setelah satu bulan berpuasa di bulan suci Ramadhan juga dapat memberi aura positif bagi bangsa ini, sehingga menjadi bangsa yang maju, rukun dan damai,” ujar Fahri. (ayu) foto: andri/parle/iw

Turki Cegah Kedatangan Calon Anggota ISIS

Islamic State Iraq and Syria (ISIS) tak luput menjadi pembahasan dalam pertemuan antara DPR RI dengan Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Pasalnya, tak sedikit masyarakat yang ingin bergabung ke ISIS, akses menuju Irak dan Suriah melalui

Turki.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, usai pertemuan di Gedung Nusnatara III, baru baru ini.

Mengutip ucapan Presiden Erdogan, Fadli menyampaikan ada sejumlah Warga Negara Indonesia yang datang

ke Turki, berencana untuk bergabung dengan ISIS. Sehingga hal ini harus dicegah, dan WNI ini harus dikembalikan.

“Mereka (Turki) mau menyetop arus kedatangan calon Anggota ISIS,” imbuhan Politisi F-Gerindra ini.

Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini menjelaskan, sampai saat ini Turki sudah mengeluarkan lebih dari US\$ 6 miliar untuk pengungsi akibat ISIS. Bahkan, saking banyaknya pengungsi



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Fadli Zon saat menyambut Presiden Turki

ini, Turki harus mencari tempat pengungsian baru.

“Pengungsi ini, karena sudah menjadi beban bagi Turki. Mereka sudah berusaha menyempit dan memulangkan 600 ribu calon anggota yang ingin

bergabung dengan ISIS,” tandas Fadli.

Hal senada pun diungkapkan Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf. Presiden Erdogan menyatakan banyak pengungsi yang datang ke Turki, sehingga menjadi tanggung jawab Turki.

Namun di satu sisi, Presiden Erdogan juga memberikan simpati kepada Indonesia yang juga menampung pengungsi Rohingya.

“Beliau (Presiden Erdogan) menawarkan, jika Indonesia membutuhkan bantuan dari Turki, Turki dengan senang hati akan membantu, khususnya dalam penanganan pengungsi, karena itu merupakan tanggung jawab sosial, hak asasi manusia, dan sesuai dengan ajaran Islam,” imbuh Politisi F-PD ini.

Selain ISIS, kerjasama pertahanan juga turut dibahas dalam pertemuan. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menegaskan, kerjasama industri pertahanan tak lama lagi akan mulai diperlakukan.

“Industri pertahanan Turki itu sangat maju. Kita juga sudah menjalin kerjasama. Secara khusus Presiden Erdogan menawarkan kerjasama pertahanan kita ditekankan pada pembuatan kapal perang,” kata Politisi F-PG ini.

Tantowi menambahkan, Turki mengklaim sebagai salah satu negara terbaik penghasil kapal perang. Sehingga, kapal perang itu tidak diproduksi di Turki.

“Mereka bersedia produksi kapal perang dilakukan di Indonesia, sehingga mereka akan mengucurkan investasi di Indonesia,” imbuh Politisi asal Dapil Jakarta III ini. (sf) foto: denus/parle/jw

Memasukkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Bentuk Kemunduran



Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah memasukkan pasal penghinaan terhadap Presiden dalam draft KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi.

“Isu pasal penghinaan presiden tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau dihidupkan lagi, ini sebuah kemunduran. Itu isu jadal,” ujar Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan dalam Halal bihalal dan diskusi di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, Rabu (4/8).

Dijelaskan Fahri, serangan kepada pejabat publik dan pejabat negara termasuk Presiden terkadang harus dibiarkan, hal itu sebagai sebuah cara memaksa pejabat negara untuk terus memperbaiki diri terhadap berbagai kelemahannya. Berbeda halnya dengan benda mati seperti Bahasa Indo-

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

nesia, Bendera Merah Putih, lagu kebangsaan dan lambang negara yang menjadi sebuah simbol negara. Lantas, apakah pribadi presiden juga termasuk simbol negara? Untuk itu harus sama-sama melihat apa saja simbol negara yang ditetapkan oleh konstitusi.

“Kalau pribadi Presiden itu kan datang dan pergi bergantian,” ungkapnya.

Selain itu ditambahkan Politisi dari Fraksi PKS ini, MK sebagaimana tuntutan masyarakat akan keprofesionalannya diyakini akan selalu konsisten dalam membuat keputusan. Sehingga jika pasal penghinaan presiden yang sudah dibatalkan oleh MK itu kembali dimasukkan dalam revisi KUHP, maka ia yakin MK akan tetap dan kembali membatalkannya. (Ayu) foto: andri/parle/iw

DPR Bahas Reformasi PBB dengan Presiden Turki

Reformasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara DPR dengan Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan tertutup itu, sempat terungkap Presiden Erdogan meminta dukungan dari Indonesia untuk reformasi PBB.

“Kita akan mendukung reformasi PBB yang akan kita rumuskan bersama Presiden (Indonesia),” kata Ketua DPR RI Setya Novanto (F-PG), usai pertemuan dengan Presiden Erdogan, di Gedung Nusantara III, baru baru ini.

Dalam kesempatan ini, Novanto, didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, dan Anggota Komisi I Tantowi Yahya.

Fadli menambahkan, dalam pertemuan tersebut Presiden Erdogan menyampaikan perlu adanya reformasi PBB, yang sekarang ini keputusan PBB hanya ditentukan oleh lima negara saja, yakni Dewan Keamanan PBB, yang meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Republik Rakyat Tiongkok.

“Presiden Erdogan melihat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar. Begitu juga dengan negara lain. Turki dan Indonesia memiliki peran strategis, namun tidak bisa mempengaruhi keputusan PBB. Karena itu perlu adanya reformasi di PBB,” imbuh Fadli.

Politisi F-Gerindra ini mengutip pernyataan Presiden Erdogan, bahwa negara-negara besar seperti Indonesia dan Turki harus bisa berperan di PBB. Apalagi, hasil pertemuan Presiden Erdogan dengan Presiden RRT Xi Jinping, juga setuju untuk reformasi PBB itu.

“Usul dari Presiden Erdogan ini pun sejalan dengan usulan Presiden Joko



Pimpinan DPR didampingi Pimpinan BKSAP dan Pimpinan Komisi I foto bersama Presiden Turki

Widodo, yang menginginkan ada reformasi di PBB. Tapi ini memerlukan lobby terlebih dahulu kepada negara-negara yang memiliki hak veto lain. Dan ini butuh juga dukungan Parlemen,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini.

Fadli yakin, jika para Anggota Dewan Keamanan PBB bersepakat, maka reformasi PBB itu dapat terjadi.

Dukung Kerjasama Dua Negara

Masih dalam kesempatan yang sama, Novanto menyampaikan, Indonesia belajar banyak hal mengenai Islam kepada Turki. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk Islam.

“Kita juga mendukung kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki dalam bidang investasi,

pendidikan, dan juga hal-hal lain. Kita juga membahas kerjasama antar Parlemen. Kita minta untuk tukar pikiran antar Parlemen kedua negara,” imbuh Politisi asal Dapil NTT ini.

Sementara itu, Nurhayati menyatakan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Indonesia dengan Turki sudah terjalin. Namun dalam pertemuan itu kembali ditekankan untuk meningkatkan kerjasama antar kedua parlemen.

“Tentunya untuk menyejahterakan masyarakat kedua negara,” imbuh Politisi F-PD itu.

Usai melakukan pertemuan, di hadapan para wartawan, Presiden mengucapkan “Halo Indonesia”, yang disambut senyum para awak media.

(sf) foto: denus/parle/iw

Nuklir, Energi Alternatif Yang Bisa Dieksplorasi



Wakil Ketua DPR Fadli Zon didampingi Ketua Komisi VII Kardaya Warnika menerima delegasi Rosatom Rusia

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, energi nuklir adalah salah satu energi alternatif yang masih bisa dieksplorasi dan digunakan di Indonesia. Sejak tahun 1960-an, Indonesia sudah memiliki visi ini, dan Presiden pertama Bung Karno telah membangun tiga reaktor nuklir percobaan di Serpong, Bandung dan Yogyakarta.

Hal itu dikemukakan Fadli Zon di DPR, Kamis (6/8) usai menerima 6 orang Delegasi Rosatom dari Rusia dipimpin A. Shilin. Rosatom adalah badan pemerintah di Rusia yang melakukan kegiatan bidang listrik (pembangkit nuklir).

“Saya kira ini suatu visi yang bagus. Memang masih ada kendala kebecoran, dan ini yang harus diatasi. Dan Rusia sudah bisa mengatasi itu karena mereka sudah banyak konsumen dan limbahnya dimasukkan ke perut bumi,” katanya.

Untuk itu Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra ini menyatakan, tambang bahan nuklir perlu dieksplorasi. Apalagi lanjutnya, Delegasi Rusia datang bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan suatu investasi dan kerja bersama sehingga patut ditanggapi dengan positif. “Perlu ada suatu *political decision* dari pemerintah untuk

mengeksplorasi energi nuklir untuk tujuan damai, terutama listrik yang nantinya jauh lebih murah untuk rakyat,” tekan dia.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyatakan, Rosatom telah membangun pembangkit listrik nuklir tidak hanya di Rusia, tetapi juga di India, China, Turki dan Vietnam serta sekarang di Finlandia.

Delegasi Rosatom menawarkan kerjasama pemanfaatan energi nuklir karena mereka berpikiran bahwa kebutuhan Indonesia akan listrik sangat besar, maka solusinya adalah dengan nuklir karena 1 unit bisa menghasilkan lebih dari 1.000 MW. Selain menawarkan kerjasama, Rosatom juga bersedia mendidik tenaga-tenaga Indonesia.

Ditambahkan Kardaya, waktu Pimpinan DPR dan Tim Komisi VII melakukan kunjungan ke Rusia bersama Komisi V diundang melihat fasilitas *crisis center*nya. “Jadi kalau ada problem bisa memonitor dari sana, dan bisa memberikan *backupnya*,” ujarnya dengan mengatakan, Rosatom sudah menjalin kerjasama dengan Batan serta akan merealisasikannya dalam bentuk yang konkrit.

Pemerintah sekarang memprogramkan untuk membangun pembangkit energi atau PLTU berkapasitas 35.000 MW, tetapi pengalaman 10.000 MW yang terealisasi 2.500 – 3.000 atau hanya 25%. “Karena itu solusi yang paling mungkin dengan nuklir, karena kebutuhannya sangat besar,” pungkas Kardaya. (mp.jk) foto: jaka/parle/iw

Munculnya Pasal Penghinaan Presiden Mengada-ada

Munculnya draft pasal penghinaan presiden dalam revisi UU KUHP sebagai sesuatu yang mengada-ada, karena pasal itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mestinya Menkumham Yasonna Laoly membaca mengenai pasal-pasal mana yang sudah dibatalkan oleh MK dan yang sudah dibatalkan tak bisa diajukan lagi.

“Serangan dan kritikan kepada pejabat itu biarkan saja, agar pejabat lebih baik dan bisa mengoreksi diri. Kalau tidak mau dikritik jangan mau menjadi pejabat negara. Mundur saja. Bahwa simbol-simbol negara itu bukan orang,

tapi bendera, lambang negara, lagu kebangsaan dan sebagainya,” tegas Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (4/8).

Namun demikian belum semua anggota DPR secara tegas menolak pasal Penghinaan Presiden masuk ke RUU KUHP tersebut, meski pasal itu sudah dihapus oleh MK pada tahun 2006. “FPPP sendiri akan melakukan kajian cermat atas putusan MK-nya terlebih dahulu sebelum menentukan sikap apakah akan menolak pasal itu atau menerimanya,” kata anggota Komisi III



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat diwawancara wartawan

Arsul Sani.

Tapi, kalau menerima kata Arsul, maka akan ada modifikasi unsur-unsur pidana untuk memastikan agar pasal itu tidak menjadi pasal 'karet' yang dipergunakan untuk membungkam kritik terhadap Presiden. PPP pun belum mengambil sikap, meski sudah ada putusan MK.

"PPP sendiri masih mengkaji secara internal dan meminta pendapat dari teman-teman Aliansi Reformasi KUHP," katanya.

Menurut Arsul, pembahasan tentang pasal-pasal yang sensitif seperti ini akan melibatkan sejumlah ahli untuk meyakinkan bahwa belum tentu semua rancangan UU itu diterima DPR. Draft itu masih rancangan. Belum tentu diterima oleh DPR seperti apa adanya," tutur Arsul lagi.

Pasal itu di UU KUHP sudah dihapus oleh MK pada tahun 2006. Tidak hanya menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus

norma itu dari RUU KUHP.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin sudah memastikan bahwa Pasal Penghinaan Presiden tidak akan dihidupkan lagi. Pembahasan RUU KUHP sendiri baru akan dilakukan setelah reses yaitu pertengahan bulan ini. "Secara azas hukum yang berlaku, yang sudah dibatalkan di MK, tidak bisa dihidupkan lagi di RUU yang baru," tegasnya. (nt/sc) foto: iwan armanias/parle/iw

Rapat Konsultasi Sepakati 14 Agustus 2015 Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD



Suasana Rapat Konsultasi di Istana Kepresidenan Bogor

Para Pimpinan Lembaga Negara menggelar Rapat Konsultasi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut membicarakan soal kenegaraan antara lain soal Pilkada 2015 dan soal persiapan gelar acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

Rapat Konsultasi dihadiri Presiden RI dan Wapres, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, minus Ketua Mahkamah Agung.

Sebelum bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Oesman Saptana

menggelar rapat gabungan, di salah satu ruang rapat Istana Bogor dengan para ketua fraksi MPR RI antara lain, Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Ketua Fraksi PKS MPR TB. Soenmandjaja, Ketua Fraksi Demokrat MPR Guntur Sasono, Ketua Fraksi Hanura MPR Syarifudin Sudding, Wakil Ketua Fraksi PKB, Sekretaris Fraksi PAN Ali Taher, dan Pimpinan Fraksi Golkar MPR Bambang W Atmanto.

Setelah hampir 6 jam Rapat Konsultasi, akhirnya menyepakati untuk menggelar Sidang Tahunan di Ruang Rapat Paripurna atau gedung bulat, kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada tanggal 14 Agustus 2015, dari pagi hari sampai sore yang sebelumnya direncanakan akan diselenggarakan

selama dua hari.

"Sidang hanya 14 Agustus saja. Jadi, MPR sidang pada pagi hari, dilanjutkan dengan DPR dan DPD pada sore hari, jadi satu hari selesai," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2015).

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kesepakatan ini dilakukan agar efisien dan tidak bertele-tele. "Tetapi nanti ada perubahan dimana seharusnya delapan lembaga yang berpidato. Nanti dicukupkan untuk kepala negara saja, sementara yang lainnya menyampaikan bahan dan mendampingi, agar lebih efisien," tutur Zulkifli.

Adapun agenda pada tanggal 14 Agustus 2015 yaitu Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dimana MPR akan bertindak sebagai Pimpinan Sidang. Dalam Hal ini Presiden akan berpidato langsung menyampaikan hasil kinerja pemerintahannya dan akan didampingi delapan Pimpinan Lembaga Negara yang juga akan menyerahkan hasil kerjanya.

Setelah agenda pertama, selanjutnya Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka menyambut HUT ke-70 Republik Indonesia di hadapan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD. Dalam hal ini DPD akan bertindak sebagai Pimpinan Sidang tersebut. Sedangkan agenda terakhir yaitu Pidato Pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 akan disampaikan oleh Presiden Jokowi, pada agenda terakhir ini DPR akan bertindak sebagai Pimpinan Sidang. (skr) foto: jaka/parle/iw

Pakistan Berharap DPR-RI Dapat Berbagi Pengalaman

Pakistan berharap DPR RI dapat berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan even internasional. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti dengan Wakil Duta Besar Pakistan Syed Zahid Raza pada Kamis (5/8) di ruang kerja Sekjen DPR RI, Senayan Jakarta.

“Ini merupakan sebuah bentuk kepercayaan negara lain terhadap DPR, dimana Pakistan menilai selama ini DPR sukses dalam penyelenggaraan even internasional. Tidak hanya itu wakil duta besar Pakistan ini juga berharap Indonesia dapat hadir dalam sidang APA (*Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Culture*) pada September 2015 mendatang dimana Pakistan menjadi tuan rumahnya. Pakistan menilai DPR sangat berperan besar dan delegasinya cukup aktif dalam even international itu,” jelas Win, begitu Sekjen DPR RI ini biasa disapa.

Ditambahkannya sebelum berlangsungnya sidang APA tentang kebudayaan di Pakistan pada September mendatang, Indonesia pun akan menjadi tuan rumah ajang serupa yakni *Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs* pada 19-20 Agustus mendatang. Adapun persiapan untuk ajang ini, Win mengatakan pihaknya sudah mempersiapkannya dengan cukup matang, baik persiapan teknis



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima Wakil Dubes Pakistan Syed Zahid Raza

maupun non teknis. Ia pun berharap Pakistan dapat hadir mengirimkan delegasinya di ajang tersebut.

Win mengatakan sejatinya DPR belum memiliki kerjasama bilateral dengan Parlemen Pakistan, padahal hubungan Indonesia dengan Pakistan sudah terjalin sejak tahun 1950. Berdasarkan kenyataan tersebut, menurut Win tidak tertutup kemungkinan ke depan DPR akan menjajaki kerjasama dua Negara dengan Parlemen Pakistan dalam bentuk GKSB (Grup kerja Sama Bilateral) di bawah Badan Kerja Sama

Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

“Indonesia dan Pakistan sudah terjalin kerjasama sejak tahun 1950, namun sampai sekarang DPR RI belum memiliki kerjasama bilateral dengan Parlemen Pakistan, padahal negara kita sama-sama mayoritas muslim. Ke depan tidak tertutup kemungkinan DPR bisa membangun kerjasama dengan Parlemen Pakistan baik melalui penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) maupun lewat berbagai kunjungan resmi lainnya,” ujar Win mengakhiri. (Ayu) foto: [jaka/parle/iv](#)

Izin Impor Gula Diobral, KPK Diminta Usut Tuntas

Sinyalemen bahwa mafia gula sudah berhasil menyusup ke pemerintahan Jokowi-Kalla, makin kuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium adanya dugaan korupsi terkait impor gula. Karena itu, KPK memanggil Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil dan Menteri Perindustrian, Saleh Husin serta pihak Kementerian Perdagangan yang diwakili oleh Irjen Kemendag Karyanto guna memaparkan hasil temuan tersebut.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta Senin(3/8). Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengakui dikepong oleh para mafia gula. Mafia-mafia itu tidak henti-hentinya menghisap untung dari impor gula. Setidaknya, mereka mendapat bayaran minimal Rp 1.000/kg jika berhasil datangkan gula impor.

Politisi Fraksi Partai Gerindra mengatakan, di saat KPK sedang mengusut tata niaga gula yang amburadul, Kementerian Perdagangan justru



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

kembali menerbitkan izin impor gula sehingga total impor menjadi sebesar 2,21 juta ton. Itu berarti, Kementerian Perdagangan sedang membuka peluang besar bagi kerugian finansial trili-



unan rupiah yang dinikmati para mafia. Hitungan sederhananya adalah 2,21 juta x 1000 kg x Rp 1000 = 2,21 Triliyun = 2.210.000.000.000 (2,21 juta). “Sebuah angka yang fantastis,” tegasnya.

Menurut Heri, uang sebanyak itu kalau disusun, tingginya bisa empat kali lipat Monas. Dan itu terus menguntungkan orang-orang yang selama ini menghisap kekayaan nasional. Orang-orang selama ini tidak punya hati karena merugikan petani tebu yang semakin hari semakin sekarat.

Mafia itu bekerja secara sistematis dan teratur. Mereka memanfaatkan lemahnya industri gula nasional yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gula untuk industri makan-minum dalam negeri. Alasan mereka klasik: gula nasional tak layak konsumsi, kualitas gula nasional tidak standar, produksi kurang, dan lain-lain. Mereka terus menghembuskan mantra-mantra “jahat” itu untuk “menekan” pemerintah mengeluarkan izin impor gula.

Celaknya, menteri-menteri terkait seperti tak berkutik di depan mafia-mafia itu. Menteri-menteri seperti tidak punya nyali sama sekali melawan mereka. Bahkan, secara terang-tera-

ngan, mereka bisa mengatur kebijakan impor gula setiap tahun. Akhirnya, izin impor gula terus dibuka lebar-lebar tanpa sepengetahuan Komisi VI DPR. “Lagi-lagi kebijakan strategis ini diambil pemerintah di saat parlemen sedang melakukan reses,” tandasnya.

Tidak sampai di situ, mafia-mafia itu menyamakan berbagai aturan teknis dengan bahasa halus. Misalnya, istilah gula premium & medium. Padahal, di industri gula, hanya dikenal 2 istilah: gula kristal putih & refinasi. Lalu, gula refinasi yang seharusnya untuk industri makan-minum, bocor ke pasar-pasar untuk konsumsi. Tidak heran, harga gula jatuh, petani gula menjerit. Dan mafia-mafia bisa leluasa memainkan harga di pasaran.

Ujungnya, tak tanggung-tanggung. Mereka sukses membanjiri pasar dengan gula impor. Gula lokal dipinggirkan. Petani tebu dibiarkan sekarat. Itu sudah menjadi siklus sesat yang akut. “Saya patut kecewa dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, dan institusi terkait lainnya, yang tidak mampu dan berani mengurai penyakit kronis. Mereka tiba-tiba menjadi penakut dan bertekuk lutut di bawah kaki para ma-

fia,” tambahnya.

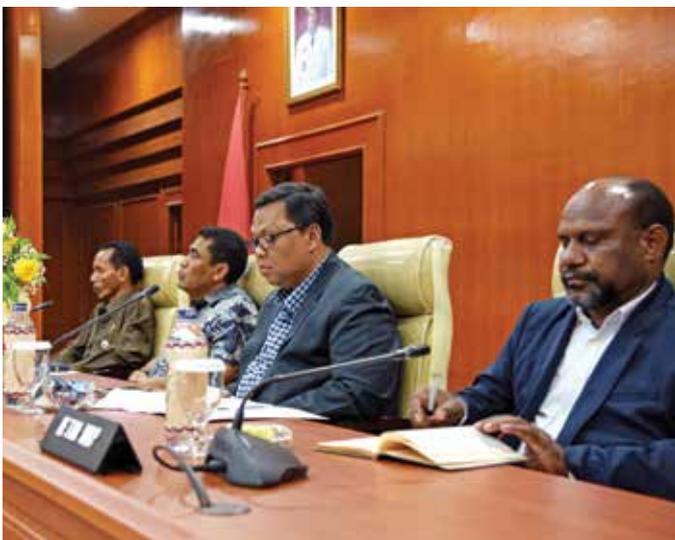
Hery mengungkap data, impor kuartal-1 2015 mencapai 650 ribu ton dan kuartal II: 950 ribu ton. Selanjutnya Komisi VI memanggil Kemendag, Kemenperin, dan Kementerian BUMN untuk dimintai penjelasan dalam Raker. “Salah satu keputusan rapat izin impor harus atas persetujuan Komisi VI DPR,” katanya.

Namun tiba-tiba Kemendag dan Kemenperin melakukan dosa pertama dengan mengeluarkan izin impor sebesar 640.340 ton. Kemudian, disusul lagi dengan izin impor sehingga jumlahnya mencapai 2,21 ton sebagai dosa kedua. “Ini bukti inkonsistensi Kemendag dan Kemenperin yang sudah seharusnya menjadi pelindung kepentingan nasional. Ibarat kata, “lain di bibir, lain di hati,” tegas Heri.

Dia mengemukakan, dosa-dosa itu tak bisa lagi dibiarkan dan harus dimin-takan tanggung jawabnya. “Oleh karena itu, saya mendukung penuh usaha KPK yang sedang mengusut dugaan praktik hitam dalam tata niaga gula. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya,” pungkas politisi Gerindra ini. (spy,mp)

foto: iwan armanias/parle/iw

Komisi II DPR Tinjau Persiapan Pilkada Serentak di Provinsi Papua



Pimpinan Komisi II DPR dan jajaran Pemprov. Papua

Jelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada Desember 2015 mendatang, Komisi II DPR akan meninjau sejumlah persiapan dan kesiapan di Provinsi Papua. Tim Kunjungan

Kerja Komisi II DPR akan bertolak menuju Bumi Cenderawasih pada Selasa (4/07/15) tengah malam. Tim Kunker Komisi II akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy.

Direncanakan, Tim Kunker Komisi II DPR akan bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua beserta Jajarannya, Pimpinan DPRD, Pangdam Cendrawasih, Kapolda Papua, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 4 sampai dengan 8 Agustus 2015. Tim Kunker Komisi II akan membahas serta mencari informasi seputar kesiapan masing-masing instansi dalam melaksanakan pilkada serentak.

Lukman mengatakan, dalam kunjungan ini akan ditekankan pada aspek keamanan, khususnya menjelang pilkada serentak agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

“Kita berharap dalam pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Papua ini berjalan dengan aman, lancar serta persiapan yang matang dan tidak terganggu dengan provokasi dari berbagai pihak,” kata Lukman, saat dihubungi Parlemenaria melalui telepon, di Jakarta, Senin (03/08/15).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, kasus kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua beberapa waktu yang lalu, tidak mengganggu ataupun tidak memberi-

kan efek negatif terhadap pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Papua.

“Kita ingin memastikan persiapan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, sehingga saat pelaksanaannya pada 9 Desember 2015 berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” imbuh Politisi asal Dapil Riau II ini.

Selain membahas persiapan dan kesiapan pilkada serentak, Tim Kunker Komisi II juga akan membicarakan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik serta juga akan melihat kesiapan pemekaran beberapa daerah di wilayah tersebut, dengan Walikota Jayapura beserta Jajarannya serta Pimpin-

an DPRD.

Dalam kunjungan ini, akan diikuti oleh Anggota Komisi II, diantaranya, Komarudin Watabun (F-PDIP), Arteria Dahlan (F-PDIP), Diah Pitaloka (F-PDIP), Agung Widyantoro (F-PG), Eni Maulani Saragih (F-PG), Endro Hermono (F-Gerindra), dan Subarna (F-Gerindra).

Kemudian, Bambang Riyanto (F-Gerindra), Fandi Utomo (F-PD), Libert Kristo Ibo (F-PD), Amran (F-PAN), Muhammad Yudi Koutoky (F-PKS), Mohammad Arwani Thomafi (F-PPP) dan Mughtar Luthfi A. Mutthy (F-Nasdem).*(HR/sf) foto: eka hindra/parle/iw*

Turki Siap Bantu Indonesia Tangani Pengungsi Rohingya

Kehadiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Jumat (31/07/15) lalu, ke DPR membawa kabar gembira dengan menawarkan bantuan sosial kepada Indonesia. Selain menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan pertahanan, Pemerintah Turki juga menawarkan kepada Indonesia kerjasama untuk membantu pengungsi Rohingya.

Menurut Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf yang mengikuti pertemuan tertutup mendampingi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta Pimpinan Komisi I, Pemerintah Turki selama ini menjadi negara yang menampung para pe-



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

ngungsi terutama dari negara konflik seperti Mesir, Irak, dan Suriah.

Nurhayati menambahkan, saat ini banyak sekali pengungsi yang tinggal di Turki dan menjadi tanggung jawab negara tersebut. Dalam pertemuan singkat dengan Ketua DPR, lanjut dia, Pemerintah Turki juga menaruh simpati kepada Indonesia yang bersedia menampung pengungsi Rohingya.

“Turki menawarkan bantuan apapun dalam membantu pengungsi Rohingya, karena menurut Pemerintah Turki hal tersebut menjadi tanggung jawab sosial, hak asasi manusia, dan sesuai dengan ajaran Islam,” pungkas Politisi F-PD ini di lobby Gedung Nusantara III.*(jk,sf) foto: jaka/parle/iw*

DPR Sayangkan Fatwa MUI terkait BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyayangkan sikap Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak sesuai syariah Islam. Fatwa MUI ini dikeluarkan pada Juni 2015, sedangkan BPJS Kesehatan sudah berlangsung dari 1 Januari 2014 lalu.

“Memang sangat disayangkan bahwa fatwa MUI tersebut dikeluarkan sebelum BPJS Kesehatan dan MUI melakukan audiensi atau pembicaraan, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat menjadi resah,” kata Okky, saat dihubungi Parlemen lewat

telepon, Jumat (31/07/15).

Politisi F-PPP ini mengakui, MUI sebagai salah satu elemen bangsa, pendapatnya memang perlu didengarkan. Namun, masyarakat luas sudah mengakui manfaat BPJS Kesehatan ini. Walaupun juga di satu sisi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

“BPJS Kesehatan ini merupakan amanah konstitusi dan jaring pengaman sosial bagi Warga Negara Indonesia. BPJS Kesehatan ini juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Okky.

Politisi asal Dapil DKI Jakarta ini menyarankan, mungkin lebih baik fatwa MUI ini di netralisir terlebih dahulu,



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

dan segera diadakan audiensi antara BPJS dengan MUI, sehingga konten di dalam BPJS Kesehatan dapat diterima oleh semua pihak.

“Lebih baik, sebelum fatwa MUI itu semakin membuat resah, seba-

iknya antara MUI dan BPJS Kesehatan melakukan pertemuan terlebih dahulu, agar tercipta pembicaraan yang lebih detail. Kedua belah pihak harus segera melakukan audiensi dan klarifikasi terkait sistem BPJS yang terbaik,” jelas Okky.

Terkait usulan pembentukan BPJS Kesehatan Syariah, Okky melihat hal itu sebagai salah satu solusi. Namun, dengan adanya multietnis di Indonesia, hal ini juga dipertimbangkan dengan matang.

“Sebetulnya, ketika banyak masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan ini, sehingga masyarakat mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, berarti BPJS Kesehatan ini dibutuhkan oleh Indonesia,” yakin Okky sembari menutup perbincangan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin membenarkan adanya fatwa yang menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah Islam. Fatwa terse-

but keputusan ijtima atau forum pertemuan Komisi Fatwa MUI di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Cikura, Bojonegara, Tegal, Jawa Tengah, pada Juni 2015 lalu.

Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah muncul karena kebijakan tersebut dinilai mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Alasan lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan juga dianggap tidak adil karena masih membedakan latar belakang peserta. (sf) foto: iwan armanias/parle/iw

JPSK Penting Untuk Mengantisipasi Krisis Keuangan



Anggota Komisi XI DPR Misbakhun dalam acara Forum Legislasi

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun menilai jika RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang sedang digodok oleh DPR bersama pemerintah ini sangat penting keberadaannya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis keuangan di Indonesia.

Dengan UU JPSK itu, maka akan terjadi konsolidasi dan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Menteri Keuangan untuk menentukan dan memastikan terjadinya krisis berikut penanggulangannya.

“Jangan sampai terjadi kasus *baill out*

Bank Century lagi,” kata Misbakhun dalam forum legislasi ‘RUU JPSK’ bersama pengamat ekonomi INDEF Eny Sri Hartati di Gedung DPR Jakarta, Selasa (4/8).

Karena itu, lanjut Misbakhun, saat ini sebanyak sepuluh fraksi di DPR mendukung pembahasan RUU JPSK tersebut. “Kalau dulu ada yang menolak, itu karena masih ada hak imunitas bagi pembuat kebijakan *baill out*, yaitu dapat perlindungan hukum, tak bisa dipidana karena kebijakannya. Itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, di mana semua orang bisa dipidana jika melanggar hukum,” ujarnya.

Tapi, dalam RUU JPSK yang baru ini menurut Misbakhun, ada kategori krisis itu seperti apa, siapa yang akan meniupkan-mengumumkan alarm pertama bahwa negara ini sedang terjadi krisis, otoritas jasa keuangan itu bukan saja BI, tapi juga Menkeu, LPS dan OJK. “Jadi, sistemnya ini yang diatur secara menyeluruh terkait protokolernya. Seperti dalam *baill out*, apakah BI, Menkeu RI, LPS, dan OJK,” ujarnya.

Di tempat yang sama, pengamat ekonomi dari INDEF Eny Sri Hartati mengapresiasi dukungan DPR terhadap RUU JPSK karena memang dianggap penting. Hanya saja persoalannya semua UU yang dibentuk pasca reformasi ini tumpang-tindih, sehingga harus diharmonisasi.

“Apalagi UU BI, OJK, LPS, dan UU Perbankan sendiri sebagai prioritas. Tapi, kalau tidak diharmonisasi akan berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, kalau berujung di MK berarti tidak produktif,” kata Eny.

Setidaknya ada delapan hal yang penting dalam RUU JPSK tersebut, diantaranya meliputi resiko ketidakpastian, instabilitas keuangan yang meningkat akibat dinamika sistem keuangan. Baik internal maupun eksternal.

“Di mana ketergantungan pada investasi dan impor asing Indonesia masih tinggi, sehingga rentan terjadi gejolak ekonomi. Perbankan sebagai lembaga intermediasi, tapi fungsinya masih rendah akibat besarnya konsumsi, bukan produksi,” katanya. (nt/sc) foto: naefuroji/parle/iw

Anggota FPP DPR Dukung Perppu Pilkada

Anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Arsul Sani mendukung adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) soal Pilkada. Calon tunggal di Pilkada kini menjadi polemik.

“Ya, artinya PPP mendukung dalam arti mempersilakan pemerintah mau melakukan itu. Persoalannya agar pembangunan di daerah tidak terhenti,” kata Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (05/08).

Menurut Arsul, Perppu itu dapat dikeluarkan Presiden Jokowi agar pembangunan di daerah tidak terhambat. Bila pilkada di tujuh daerah maka penyerapan anggaran semakin kecil.

Meskipun calon tunggal hanya ada di 7 dari 269 daerah, Anggota Komisi III DPR itu tetap menilai perppu dapat dikeluarkan karena adanya kegentingan.

“Oh iya ini relevansi memang untuk 7 daerah dan salah satunya itu Surabaya. Kan Surabaya kota terbesar kedua di Indonesia. Genting kan selama ini terjemahannya subjektif presiden. Presiden anggap genting, ya itu persoalan *never ending debate*,” ujar anggota komisi III DPR ini.

Menurut Arsul, perdebatan mengenai perppu tidak akan habisnya bila terkait prosedur formil atau tidak. Mengenai calon yang diusung partai berlambang Ka’bah di tujuh daerah,



Anggota DPR Arsul Sani

Arsul mengakui kader PPP banyak yang ditolak.

“Pemahaman KPUD tidak seperti yang dibayangkan. Ada dua kubu, karena tidak punya struktur ya dia tidak mengajukan. Kalau dua kubu mengajukan kan calon harus sama. Hak untuk mengajukan itu dijamin UU,” tegas Arsul. (as) foto: andri/parle/iw



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan

Pemerintah yang berencana menyusun Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) diharapkan tidak membunuh industri kreatif di Tanah Air. Ini penting, karena industri kreatif juga memanfaatkan perangkat elektronik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) menjelaskan, saat ini memang sedang ramai promosi dan transaksi perdagangan lewat media online. Nilai perdagangan elektronik bisa mencapai triliunan rupiah. Dan konsumen yang berbelanja lewat media online tidak boleh dirugikan. Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) ini diharapkan bisa memperjelas peran semua pelaku dan penyelenggara usaha elektronik dagang (E-Dagang).

Politisi Partai Gerindra itu, sangat berharap dengan RPP E-Dagang ini, industri kreatif tetap menjadi bagian

Aturan E-Dagang Jangan Membunuh Industri Kreatif

yang harus diperhatikan. “Saya berharap peraturan ini bisa mendukung terwujudnya kemajuan industri kreatif Indonesia yang mayoritas beroperasi secara elektronik. Jangan sampai RPP justru membunuh semangat industri kreatif Indonesia. Industri kreatif adalah masa depan Indonesia sekaligus tulang punggung ekonomi nasional ke depan,” katanya saat dihubungi Rabu (5/8).

Seperti diketahui, saat ini toko-toko online menjamur sangat masif dengan memanfaatkan jaringan internet. Sebut saja, OLX, Bukalapak, Berniaga, Kaskus, dan Tokopedia. Reservasi hotel dan pesawat juga memanfaatkan media online. Bahkan, kini sudah ada layanan ojek online lewat Gojek dan taksi online lewat Uber. “Kemudahan transaksi serta efisiensi biaya dan waktu menjadi keunggulan tersendiri yang membuat pelaku usaha dan konsumen memilih cara online untuk memenuhi kebutuhannya.”

Sebetulnya RPP ini, lanjut Heri, merupakan amanat UU No.7/20014 tentang Perdagangan. Dalam Bab VIII UU tersebut diatur tentang TPMSE. Pelaku usaha wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar tentang suatu produk atau jasa yang

ditawarkan. Heri menilai, masih ada kerancuan dalam draf RPP yang diajukan pemerintah. Misalnya, soal defenisi pelaku usaha yang mencakup pedagang sendiri, penyelenggara PMSE, dan penyelenggara sarana prasarana.

“Nah, perantara PMSE seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Olx itu masuk kategori penyelenggara transaksi atau sarana perantara? Karena itu, hal-hal teknis dan spesifik seperti itu harus diperhatikan secara penuh dan serius agar tidak menimbulkan multitafsir yang membuat kepastian hukum menjadi ngambang,” papar Heri.

Masih menurut Heri, masalah lain yang diatur RPP itu adalah soal pedagang yang wajib memiliki izin khusus perdagangan elektronik dari menteri. Belum jelas izin apa yang dimaksud dan peruntukan izinnya seperti dimuat dalam pasal 18 RPP. Pelaku usaha tentu ingin mendapat keuntungan yang jelas dengan RPP ini.

“Jangan sampai syarat-syarat birokratis model begini justru menghambat dan membuat PMSE tidak praktis dan efisien. Apalagi persepsi publik terkait perizinan di birokrasi kita masih buruk dan rawan penyelewengan,” imbuh Heri. (mh) foto: iwan armanias/parle/iw



Pariwisata ASEAN Jaga Warisan Budaya



Delegasi DPR RI menandatangani Report of the 7th AIPA Caucus

Potensi pariwisata di kawasan ASEAN sangat menarik, selain kaya dengan situs warisan budaya juga kaya dengan wisata alam. Diharapkan, potensi wisata yang ada di kawasan regional ini bisa menjaga kelangsungan warisan budaya dan lingkungan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan delegasi parlemen ASEAN yang tergabung dalam ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) pada sidang The 7th ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) Caucus di Siem Reap, Kamboja, 26-30 Juli 2015 lalu. Delegasi DPR RI dipimpin Junico BP Siahaan (F-PDI Perjuangan). Hadir pula dua anggota lainnya, Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG) dan Kartika Yudhisti (F-PPP).

Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh anggota AIPA, kecuali Filipina. Sidang dibuka secara resmi pada 26 Juli oleh *Chairman of Cambodian AIPA National Parliamentary Group and Chairman of the Organizing Committee Cheam Yeap*. Dia berharap, agar para anggota AIPA dapat bertukar pandangan

dan berbagi pengalaman mengenai upaya individual dan kolektif dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

Isu ini dinilai penting mengingat Asia Tenggara memiliki potensi pariwisata besar yang diharapkan dapat berkembang pesat dengan tetap menjaga lingkungan dan warisan budaya yang ada. Agenda sidang membahas berbagai upaya masing-masing negara dalam menjalankan resolusi-resolusi yang telah diadopsi dalam Sidang Umum ke-36 AIPA di Laos, September 2014 lalu.

Pada agenda pertama, delegasi DPR RI menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menyusun kebijakan hukum, termasuk ratifikasi berbagai instrumen hukum dan perjanjian internasional. Selain itu dibahas juga soal penyediaan anggaran, sosialisasi, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Pengembangan kerja sama di berbagai level dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, juga sudah dilakukan Indonesia.

Sementara pada agenda kedua yang membahas promosi konservasi alam, delegasi Indonesia mengemukakan telah memiliki Undang-Undang No.10/2009 tentang Pariwisata. UU ini menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Delegasi Indonesia kemudian mengusulkan pengembangan standarisasi pekerja pariwisata ASEAN sebagai salah satu hal konkrit yang dapat dipertimbangkan parlemen ASEAN. Indonesia sangat berkomitmen membangun pariwisata berkelanjutan, baik dalam bentuk legislasi maupun kebijakan.

Sidang ini pada akhirnya menghasilkan *Report of the 7th AIPA Caucus* serta Draft Resolusi mengenai ASEAN Tourism: *Promoting Nature Conservation and Developing Sustainable Tourism* yang akan diajukan dan diadopsi di Sidang Umum AIPA ke-36 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 6-12 September 2015 yang akan datang. (mh) foto: BKSAP/parle/iw

Komisi V DPR Tinjau Proyek Infrastruktur di Maluku

Dalam rangka melakukan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV meninjau berbagai proyek infrastruktur, sarana dan prasarana transportasi seperti Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe B dan sarana lainnya ke Provinsi Maluku, Kamis (6/8/2015).

Rencananya, Tim Kunker Reses yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta pukul 08.15

WIB. Setibanya di Bandara Pattimura Ambon, rombongan Komisi V DPR RI terlebih dahulu akan meninjau fasilitas sarana dan prasarana Bandar Udara Pattimura Ambon, dilanjutkan meninjau Terminal Tipe B di Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku.

Sore harinya, Tim Kunker Reses Komisi V DPR juga akan meninjau akses jalan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional Ke-XI (PESPARAWI), dan diakhiri pertemuan dengan Gu-



Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis

bermur Maluku dan jajarannya serta ekspose dari mitra kerja Komisi V DPR RI terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku.

Sementara agenda esok harinya, Jum'at (7/8/2015) tak kalah padat. Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI berencana meninjau Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Amahai, Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat akses pelayanan, fasilitas, sarana dan prasarana infrastruktur pelabuhan penyeberangan, dilanjutkan meninjau proyek rehabilitasi dan rekonstruksi

Bencana Alam Sungai Kawanua.

Selepas shalat Jum'at Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI akan melanjutkan peninjauan ke jalan nasional Trans Seram, meninjau pembangunan Dermaga Laut Masohi dan rencana pembangunan *dry port* Makariki, serta meninjau sarana dan prasarana pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakarya.

Ikut dalam rombongan Tim Kunker Reses Komisi V DPR diantaranya : Fary Djemy Francis (Ketua Tim/Ketua Komisi), Muhidin Mohamad Said (Wakil

Ketua), Michael Wattimena (Wakil Ketua), Yudi Widiana Adia (Wakil Ketua), Yoseph Umarhadi, Sadarestuwati, Damayanti Wisnu Putranti, Daniel Muttaqien Syafudin, Ridwan Bae, Elion Numberi, Moh Nizar Zahro, Ade Rezki Pratama, Andi Iwan Darmawan Aras, Umar Arsal, Anton Sukartono Suratno, Syahrulan Pua Sawa, Abdul Hakim, Peggí Patricia Pattipi, Mohammad Toha, Fatmawati Rusdi, Soehartono dan Fauzih Amro. (oji) foto: iwan armanias/parle/iw

DPR Harus Prioritaskan RUU JPSK

DPR diminta untuk segera membahas Rancangan Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Pasalnya, hal ini menyangkut kelangsungan hidup perekonomian Indonesia.

Demikian terungkap dalam diskusi bertemakan Asumsi Makro dan Isu-isu Krusial dalam RAPBN 2016, yang diselenggarakan oleh Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara, di Pansus C, Gedung Nusantara II, Rabu (5/08/15). Diskusi menghadirkan narasumber utama Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama dan Alumni UGM, Muhammad Edhie Purnawan.

"Saya menyarankan kepada DPR untuk segera membahas RUU JPSK, karena alasannya ini sangat fundamental. Hal ini juga menyangkut kelangsungan hidup perekonomian bangsa Indonesia," kata Edhie, usai acara.

Edhie yakin, jika RUU JPSK disahkan, RUU ini menjadi landasan untuk menangani dan me-manage internal dan eksternal *shock*. Sehingga membuat ekonomi Indonesia lebih stabil.

"Kita berharap RUU JPSK yang telah masuk Prolegnas Prioritas tahun 2015, untuk bisa diselesaikan secepat mungkin. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jika sudah ada peraturan yang ketat dan jelas, maka ketika mengambil keputusan ini menjadi tidak ragu-ragu, dan lebih *confident*," jelas Edhie.

Edhie menyarankan, jika saat ini ada RUU tentang ekonomi yang dibahas, seperti RUU Perbankan, RUU Bank Indonesia, dan RUU JPSK, ia meminta kepada DPR untuk membahas RUU JPSK lebih awal.

"Saya kira, jika tidak bisa paralel ketiga RUU itu, setidaknya harus dipilih salah satunya. Saya menyarankan untuk membahas RUU JPSK terlebih dahulu," saran Edhie.

Selain soal RUU JPSK, Edhie juga menyoroti kondisi ekonomi terkini. Terkiat besaran utang luar negeri Indonesia dan kondisi ekonomi saat ini, Indonesia masih memiliki jarak cukup jauh dibanding krisis di Eropa, khususnya Yunani.

"Memang kita punya utang luar negeri, namun jika melihat rasio, kita masih lebih aman dibanding krisis tahun 1998. Kondisi ekonomi kita saat ini cukup bagus. Meskipun kita tidak bisa mengatakan kemudian kita dapat berutang sebanyak-banyaknya. Namun kita harus hati-hati ketika mengajukan utang. Karena saat ini gabungan utang pemerintah dan swasta, hampir mendekati US\$ 300 miliar," tam-



Suasana Diskusi yang bertemakan Asumsi Makro dan Isu-isu Krusial dalam RAPBN 2016

bah Edhie.

Jika besaran utang dibandingkan rasio GDP, Edhie menilai saat ini relatif aman, walaupun Indonesia juga mesti berhati-hati. Dalam kesempatan ini, Edhie juga membedah asumsi-asumsi Makro dalam APBN 2016.

Sementara itu, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Satyanto Priambodo menyatakan diskusi ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada analis, tenaga ahli fraksi maupun komisi, dan peneliti di P3DI, sehingga memberikan warna dalam melakukan kajian-kajian analisis, khususnya dalam bidang ekonomi makro.

"Hasilnya nanti dari Biro Analisa ini memberikan substansi pada Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan dan Komisi-komisi terkait guna memasuki pembahasan APBN yg direncanakan akan dibacakan Presiden pada 14 Agustus 2015 mendatang," jelas Nanang, panggilan akrab Satyanto.

Terkait permintaan Edhie yang meminta DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU JPSK, Nanang menilai hal ini senada dengan harapan para analis DPR. Namun, bukan berarti pembahasan RUU ini kemudian mengabaikan pembahasan RUU lainnya.

"Kita ketahui bersama, RUU JPSK merupakan RUU yang sangat penting, terkait bagaimana pemerintah menghadapi satu permasalahan ekonomi yang tidak baik. Tapi tidak boleh mengabaikan RUU lain seperti RUU Perbankan. Tentunya ini juga menjadi masukan bagi DPR," imbuah Nanang.

(sf) foto: iwan armanias/parle/iw



Komisi VII Gali Informasi Terkait Penyediaan dan Distribusi BBM di Kalteng



Anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo

Kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan mencari informasi tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas oleh PT Pertamina (Persero).

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo saat memimpin rombongan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Tengah Selasa (4/8) malam. Rombongan ini semula

dipimpin Wakil Ketua Komisi Mulyadi, namun mendadak ditugaskan ke Cepu, Jawa Tengah, sehingga pimpinan Tim dilimpahkan ke Aryo.

Dia mengatakan selain mencari informasi dan mendapatkan masukan juga ingin mendapat gambaran tentang kesiapan infrastruktur dan pengembangan PT Pertamina di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat sekarang ini.

Menurut politisi Gerindra ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas merupakan sumber daya yang sangat vital bagi masyarakat, sehingga ketersediaannya harus selalu terjaga. Selain upaya menjaga ketersediaan pasokan aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah penguatan infrastruktur untuk pendistribusiannya.

Mengingat kondisi geografis Kalimantan Tengah yang cukup beragam menyebabkan cukup kendala yang menyulitkan dalam transportasinya. Sejumlah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah masalah depot, stasiun pengisian bahan bakar serta armada angkutnya.

“Karena itu dalam kondisi apapun, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah ditunjuk dan diberikan amanat serta mandat untuk penyediaan BBM bagi rakyat harus dapat menjamin ketersediaan dan distribusi

BBM untuk rakyat,” tegas Aryo.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa penyediaan dan distribusi BBM di Kalimantan Tengah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Komisi VII DPR mengharapkan adanya informasi yang akurat mengenai berbagai hal terkait dengan maksud kunjungan kerja ini.

Beberapa aspek yang perlu diberikan informasi kepada Komisi VII DPR antara lain mengenai gambaran dan informasi tentang kondisi pasokan, ketersediaan dan kebutuhan BBM dan gas serta kendala yang dihadapi dalam pendistribusiannya.

Selain itu gambaran tentang infrastruktur PT Pertamina (Persero) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM, dan adanya penyimpangan dan pemanfaatan BBM khususnya dalam penyalahgunaan BBM Solar bersubsidi.

Aryo menekankan, seluruh permasalahan terkait dengan penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak yang menjadi tanggungjawab PT Pertamina (Persero) dapat teratasi dengan baik. Dengan demikian, kelangkaan BBM serta kesulitan masyarakat untuk mendapatkan BBM serta penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak terjadi lagi.

(spy,mp) foto: andri/parle/iw

Masalah SDM Jadi Kendala Kinerja BPN Papua

Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), dinilai menjadi salah satu kendala Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Papua dalam menjalankan kinerjanya. Kurangnya jumlah SDM mengakibatkan permasalahan pertanahan tak kunjung selesai.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan), dalam pertemuan antara Tim Kunker Komisi II DPR dengan 13 Kepala BPN se-Provinsi Papua, di Papua, Rabu (5/07/15). Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota Komisi II DPR Komarudin Watabun (F-PDI Perjuangan).

“Masalah SDM menjadi pemicu terkendalanya kerja BPN secara kuantitas maupun kualitas, dan kompetensi dalam

penyelesaian sengketa, konflik dan perkara. Hal ini juga menjadi penyebab lamanya konflik kasus tanah dalam kurun waktu 40 tahun belum terselesaikan dengan baik. Apakah SDM yang ada sudah mampu,” tandas Arteria, seolah bertanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan) menegaskan, BPN harus lebih mengambil peran dalam politik pertanahan dan tidak hanya terpaku pada masalah administrasi pertanahan serta kebijakan-kebijakan program pemerintah yang bersifat nasional pada pemerintah periode sebelumnya yang dijalankan di Papua.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II DPR Agung



Anggota Komisi II DPR Komarudin Watabun (tengah)

Widyantoro. Politisi F-PG ini menyatakan, BPN harus mengambil inisiatif untuk dilakukannya penyusunan regulasi yang ter-integrated agar dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan tidak saling bertentangan.

“Penghapusan database tanah yang terindikasi terlantar harus berdasarkan data-data yang valid,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR

Fandi Utomo (F-PD) mengatakan, permasalahan hukum adat harus terlebih dahulu terdefinisi dengan jelas untuk dapat diakomodir dalam hukum positif yang berlaku.

“Negara juga harus aktif secara langsung dalam menangani permasalahan-permasalahan pertanahan di daerah,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Timur ini.

Anggota Komisi II DPR Komarudin Watabun meminta kepada seluruh SDM di BPN Kanwil Provinsi Papua untuk meningkatkan kinerjanya. Mengingat, BPN merupakan benteng terakhir hutan tropis.

Sebelumnya, Kepala BPN Kanwil Provinsi Papua, Nikolas Wanenda, mengatakan bahwa saat ini BPN Kanwil Papua memiliki SDM sebanyak 249 orang yang mencakup wilayah kerja seluas 29 kabupaten atau kota.

“Dengan minimnya SDM tersebut sangatlah pelik untuk menangani beberapa kasus seperti masalah ganti rugi terhadap tanah-tanah bekas transmigrasi. Misalnya di distrik Nablom dan Nimbokrang, serta ganti rugi tanah adat/ulayat masyarakat hukum adat yang dipakai dalam pemukiman transmigrasi,” jelas Nikolas.

Kunjungan Kerja Komisi II DPR ini juga diikuti oleh Anggota Komisi II DPR Eni Maulani (F-PG), Endro Hermono (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Bambang Riyanto (F-Gerindra), Libert Kristo Ibo (F-PD), M. Yudi Kotouky (F-PPS), M. Arwani Thomafi (F-PPP) dan Muchtar Lutfhi A. Mutty (F-Nasdem). (HR/sf) foto: eka hindra/parle/iv

Sekjen DPR Resmikan Kantin Risanti



Sekjen DPR Winantuningtyastiti didampingi Ibu-ibu Dharma Wanita meresmikan Kantin Risanti

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti meresmikan Kantin Risanti, yang kini berada di lokasi yang baru. Lokasi Kantin Risanti yang baru berada di sebelah Kantin Pujasera, Kompleks Parlemen. Sebelumnya, Kantin Risanti berada di Gedung Nusantara II, lantai II.

“Lokasi yang baru ini lebih terkon-

sentris dengan kantin-kantin yang lain, jadi lebih mudah mengarahkan para konsumen untuk membeli makanan di lokasi yang sekarang,” kata Win, panggilan akrab Winantuningtyastiti, usai peresmian kantin yang berada di bawah pengurus Dharma Wanita Pusat Setjen DPR ini, Senin (3/08/15).

Win menambahkan, lokasi yang dulu

memang lebih strategis dibanding lokasi yang baru ini. Namun, kelemahannya adalah terpisah dengan kantin-kantin yang lain.

Orang nomor 1 di Setjen DPR ini juga mengakui, kondisi infrastruktur di lokasi yang baru ini belum cukup sempurna. Pasalnya, akses menuju kantin masih belum bagus dan sempit. Luas ruang kantin pun di rasa belum memadai.

“Kita juga masih memikirkan infrastruktur akses jalan menuju kantin, karena masih belum lancar. Nanti kita perhatikan betul akses ke sini. Karena mungkin bisa saja tamu-tamu Anggota Dewan makan di sini,” imbuh Win.

Win berharap ke depannya, Kantin Risanti dapat meningkatkan pelayanan dan jenis menu yang disajikan, sehingga calon konsumen lebih tertarik.

Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Pusat Setjen DPR, Titik Djuned berharap, lokasi baru dapat memajukan Kantin Risanti. Kejayaan Kantin Risanti yang berada di lokasi yang lama, tetap terjaga. Pasalnya, Kantin Risanti berada di Gedung Nusantara II sudah lebih dari 40 tahun, dan sempat vakum lebih dari setengah tahun, sebelum

menempati lokasi baru ini.

“Kami akan tetap menjaga variasi menu, sehingga konsumen merasa menikmati sajian menu di kantin yang baru sekarang,” kata Titik.

Titik juga berjanji, sembari mema-

sarkan lokasi baru ini, pihaknya akan mencari menu-menu baru yang sesuai dengan pangsa pasar. Ia juga membuka diri atas masukan dari konsumen terkait menu maupun pelayanan.

Sebelumnya, kantin diresmikan oleh

Win melalui potong tumpeng, yang diserahkan kepada Titik. Usai acara, seluruh pegawai yang hadir, diminta untuk mencicipi menu baru andalan Kantin Risanti, yakni sop gurame.(sf)

foto: jaka/parle/iw

Setjen DPR Siapkan Sejumlah Acara Sambut HUT RI dan DPR ke-70

Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-70 tahun, Sekretariat Jenderal DPR RI telah mempersiapkan serangkaian acara. Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti saat ditanya wartawan menjelaskan, rangkaian peringatan HUT RI ke-70 tahun itu akan dimulai dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang rencananya juga akan diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPR RI serta seluruh staf dan karyawan Setjen DPR RI tepat pada tanggal 17 Agustus 2015 mendatang.

“Setelah itu dilanjutkan dengan berbagai lomba, seperti lomba panjat bambu yang jumlahnya mencapai 70 buah bambu, serta berbagai perlombaan lainnya yang juga melibatkan staf dan karyawan beserta keluarganya, seperti lomba tarik tambang dan lomba mewarnai,” jelas Win, begitu Sekjen DPR RI ini akrab disapa.

Tidak hanya itu, lanjut Win, ada sejumlah pameran yang ikut digelar dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-70 tahun nanti, mulai dari pameran foto hingga pameran filateli.

Acara akan berlanjut hingga perayaan HUT DPR RI, dengan menggelar budaya tradisional bangsa sendiri, wayang kulit semalam suntuk. Hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan DPR RI sebagai sebuah langkah untuk tetap me-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

lestarikan budaya bangsa sendiri, yang menjadi salah satu bukti kecintaan pada tanah air, Indonesia.(Ayu) *foto: andri/parle/iw*

Komisi II DPR Dukung Evaluasi Otsus Papua

Komisi II DPR mendukung evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pasalnya, Otsus Papua sudah berjalan lebih dari 15 tahun, sehingga pantas untuk dievaluasi.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy (F-PKB) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Kamis (6/08/15). Pertemuan berlangsung dengan Pemerintah Daerah Papua, Pangdam XVII Cendrawasih yang diwakili Kasdam Brigjen Tatang Sulaiman dan Kapolda Papua yang diwakili Karo Ops Polda Papua Kombes Tatang.

“Saya kira sudah saatnya dilakukan

evaluasi Otsus Papua, karena sudah 15 tahun pelaksanaan Otsus ini, supaya objektif dan pelaksanaan Otsus yang sudah 15 tahun itu seperti apa. Terkait soal pemekaran, evaluasi Otsus, dan revisi UU Otsus serta aspirasi-aspirasi lain tentang Papua,” kata Edy.

Politisi asal Dapil Riau ini menyatakan, Komisi II sudah menindaklanjuti serta membicarakan dengan pemerintah terkait hal ini, namun belum ada sikap dari pemerintah.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyatakan, ada yang menganggap UU Otsus gagal, sehingga harus direvisi.

“Apa penjelasannya dan sektor apa



Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy

saja yang dianggap gagal,” imbuh Politisi F-PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Politisi asal Dapil Jawa Timur ini menyatakan, pihaknya akan mendukung pemekaran di Provinsi Papua, sepanjang benar-benar ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Papua.

Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai persiapan Pilkada serentak yang akan digelar tahun ini. Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro (F-PG) mendukung dan mendorong pihak keamanan TNI dan Polri untuk antipati potensi konflik yang mengganggu keamanan pelaksanaan pilkada.

“Tak hanya itu, perlunya sosialisasi pemahaman pilkada serentak 2015 dan juga disepakati tentang usulan dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua tentang pedoman peradilan pelanggaran pidana umum pada pilkada,” kata Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Edy menyatakan bahwa ini menjadi tugas Komisi II untuk mendorong agar pemangku kepentingan segera membuat pedoman peradilan pelanggaran pidana umum pada pilkada.

“Kajati bilang belum ada pedoman-nya. Kami di Komisi II juga belum membahas pedoman penanganan pidana pada pilkada ini. Kita akan bicarakan dengan Bawaslu pusat dan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung, dan akan kita lakukan dalam rangka menyusun mekanisme pedoman peradilan umum,” jelas Edy.

Sebelumnya, Karo Ops Polda Papua,

Kombes Tatang menyebut jumlah anggaran yang disetujui untuk pengamanan Pilkada serentak sebesar Rp 29,9 miliar.

“Anggaran pengamanan Pilkada untuk 11 kabupaten yang akan menggelar pilkada, sudah disetujui Rp 29,9 miliar dari 52,2 miliar yang diusulkan. Dana itu belum cair dan akan cair jelang kampanye,” kata Tatang seraya menambahkan untuk pengamanan pilkada, Polri melibatkan 5.000 personel. (hr/sf) foto: eka hindra/parle/iw

Dalam Demokrasi Tak Ada Lawan Bumbung Kosong



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman (kanan) dalam Dialektika Demokrasi

DPR RI menegaskan tak ada dalam demokrasi dan Pilkada itu melawan bumbung kosong, sehingga jika sampai pada batas perpanjangan pendaftaran juga tetap tunggal, maka sebaiknya Pilkada itu harus ditunda sampai 6 bulan ke depan atau tetap sampai 2017. Sebab, dalam demokrasi itu tak ada yang melawan bumbung kosong. Apalagi kalau bumbung kosong itu nantinya ternyata suaranya lebih besar dari calon tunggal, apakah akan disahkan sebagai pemenang?

“Itu jelas tidak benar, maka dalam Pilkada serentak itu harus ada lebih dari satu calon. Bumbung kosong itu di desa, yang memang tidak ada partai. Karena itu harus dibicarakan bersama dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus fleksibel, jangan terlalu kaku, rigid. Masak terlambat 16 menit saja pendaftarannya ditolak, dan sekarang perpanjang waktu pendaftaran hanya 3 hari untuk 7 daerah (calon tunggal),” tegas Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman dalam Dialektika Demokrasi ‘Rekomendasi Bawaslu Perpanjang Pendaftaran Pilkada’ bersama anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto, peneliti politik LIPI Siti Zuhro, dan tokoh muda Raja Sapta Oktohari di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (6/8).

Karena itu Rambe meminta DPR dan Presiden RI bersama

KPU dan Bawaslu untuk konsultasi bersama menyikapi perkembangan politik terakhir ini, demi keutuhan NKRI. Sebab, kalau tidak, hiruk-pikuk pilkada ini bisa mengancam desintegrasi bangsa. “Jadi, KPU ini jangan sok-sokan, kaku dalam melaksanakan maupun membuat peraturan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI FPAN Yandri Susanto berharap, yang merasa menang dalam Pilkada itu jangan sombong, congkak, dan yang merasa kalah jangan putus asa, karena belum tentu yang merasa menang itu akan menang, dan sebaliknya yang merasa kalah akan kalah. Untuk itu, parpol harus memanfaatkan perpanjangan pendaftaran itu secara maksimal untuk mengajukan calon.

“Dalam politik itu ada keajaiban-keajaiban. Toh, sejalan dengan otonomi daerah bahwa membangun daerah itu tidak bisa sendirian melainkan butuh kebersamaan,” tegas Yandri.

Dia sependapat dengan Rambe, jika Pilkada ini jangan sampai tersandera oleh 7 daerah calon tunggal. Juga tidak ada alasan kegentingan untuk menerbitkan Perppu Pilkada. “Jadi, kalau sampai waktu perpanjangan itu ke-7 daerah itu tetap tidak berubah, maka harus ditunda sampai 2017. Untuk itu yang terpenting adalah sisa waktu ini dimanfaatkan secara maksimal oleh parpol untuk bisa mengajukan calon,” jelas Yandri.

Menyinggung ‘mahar’ Pilkada, Yandri meminta para pihak untuk terus-terang melaporkan ke partai atau pihak-pihak terkait, karena ‘mahar’ itu dilarang dalam UU. “Jika terbukti memberi dan menerima mahar politik, maka calon yang bersangkutan bisa didiskualifikasi dan parpol langsung diberi sanksi,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Peneliti LIPI Siti Zuhro menegaskan Pilkada serentak ini belum ada *role model*-nya di dunia, dan Indonesia baru melaksanakan yang pertama kali pada 9 Desember 2015 mendatang. Untuk itu KPU dan Bawaslu jangan sampai *ngos-ngosan*, tergesa-gesa dan memaksakan diri untuk melaksanakan pilkada serentak, karena konsekuensi sangat besar.

“Aturan, anggaran, kesiapan penyelenggara, kesiapan

parpol, sengketa pilkada yang bisa mendorong desintegrasi bangsa. Jadi, anggaran yang triliunan rupiah ini jangan sampai membuat Pilkada blunder dan tidak sejalan dengan otonomi daerah. Kalau pilkada serentak ini tidak mampu mengkonsolidasikan daerah untuk apa? Makanya jangan terjebak asumsi bahwa *incumbent* itu segala-galanya,” tegas Siti Zuhro

Perpanjangan pendaftaran selama 7 hari oleh Bawaslu itu menurut Siti Zuhro juga tidak cukup, karena parpol membutuhkan waktu yang cukup untuk benar-benar mengajukan kader terbaiknya sebagai calon kepala daerah, agar kontestasi politik ini benar-benar berjalan baik, *fair*, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka ke depan rakyat akan merasa wajib untuk memilih calon pemimpin daerahnya. Tapi, kalau sudah diawali dengan hal-hal yang destruktif, maka pilkada serentak ini tak akan ada manfaatnya, karena tak berkorelasi dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang baik,” ungkapnya.

Raja Sapta Oktahari berpendapat di tengah pertumbuhan ekonomi yang melembat saat ini, maka dibutuhkan percepatan-percepatan proses politik agar terwujud stabilitas sosial. Kalau tidak, maka rakyat akan seperti demam batu akik lagi, yaitu terus-menerus membicarakan kisruh pilkada. (nt/sc) foto: rizka/parle/iw

Peternak Keluhkan Kegagalan Reproduksi Sapi

Anggota Komisi IV DPR, Hermanto dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I di masa reses banyak menerima keluhan kegagalan reproduksi sapi dari para peternak setempat.

“Sekarang ini peternak sudah terbiasa mengundang mantri hewan untuk melakukan inseminasi buatan (IB) terhadap sapi miliknya. Tetapi upaya reproduksi ini umumnya baru berhasil setelah dilakukan 4-5 kali. Jadi 3 kali IB sebelumnya gagal,” ungkap Hermanto dalam keterangan pers baru-baru ini.

Bahkan, lanjutnya, ada yang mengeluh sudah 8 kali IB sapihnya tidak juga kunjung *bunting*. “Peternak itu mengaku sangat kesal,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, untuk mendapat layanan IB tersebut tidak gratis. “Sekali IB peternak mengaku harus bayar 50-70 ribu,” ucapnya.

Memang ada yang hanya dengan sekali IB sapi bisa langsung *bunting*. “Tapi ini jarang terjadi,” katanya.

Permasalahan lain, menurutnya, IB yang berhasil juga tidak menjamin sapi *bunting* bisa sampai melahirkan. “Banyak keluhan sapi yang berhasil *bunting* itu selanjutnya keguguran,” ungkapnya.

Selain itu, sapi yang berhasil beranak tahun ini seringkali tidak beranak di tahun berikutnya. “Para peternak minta dibantu agar sapihnya bisa beranak tiap tahun,” imbuhnya.

Lebih jauh Hermanto mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) agar secara proaktif membantu peternak dalam mengatasi masalah ini. “Masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami masyarakat Sumbar ini sangat mungkin dialami juga oleh para peternak sapi di seluruh Indonesia,”



Anggota Komisi IV DPR, Hermanto

katanya.

Kementan harus menangani masalah ini secara serius.

“Kementan harus mampu mengatasi masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami masyarakat untuk mencapai swasembada daging di masa datang,” pungkasnya. (mp) foto: rizka/parle/iw

Impor Garam Sebaiknya Hanya Untuk Industri

Kebijakan pemerintah untuk mengimpor garam sebaiknya ditujukan hanya untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Sebaliknya, kebutuhan garam konsumsi tak perlu impor lagi, karena produksi garam lokal sudah mampu memenuhinya.

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaedi (dapil Jatim XI) saat dihubungi Jumat (7/8). Menurut Junaedi, bila sudah melakukan impor garam industri,

sebaiknya diawasi dengan ketat agar tidak merembes ke pasar konsumsi. “Yang penting impor itu untuk garam industri. Rekomendasinya harus dari Kemenperin. Dan saya sudah bicara dengan Menperin Saleh Husin di Surabaya bahwa impor dialokasikan untuk industri,” katanya.

Komentar Junaedi ini menanggapi rencana pemerintah yang ingin mewajibkan para importir produsen garam industri dan konsumsi untuk

menyerap garam lokal sebagai syarat mendapatkan rekomendasi impor garam. Kalau tidak mau menyerap garam lokal, mereka tak mendapat izin impor. Menurut politisi Partai Nasdem ini, kebijakan tersebut sebaiknya diarahkan hanya untuk garam industri. Tak perlu ada cerita lagi tentang impor garam konsumsi.

Junaedi membenarkan pernyataan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bahwa produksi garam lokal sangat cukup untuk konsumsi di dalam negeri. Junaedi lalu mengungkapkan, selama ini bila ada izin impor garam industri, ternyata sisa kuota impornya diselewengkan untuk dioplos dengan garam lokal, lalu di



Anggota Komisi VI DPR RI Slamet Junaedi

jual ke pasar konsumsi. “Selama ini pengawasannya tidak jelas dan tidak efektif. Kalau pengawasannya benar, impor garam industri itu aman,” tegasnya.

Dia mengaku punya data lengkap seputar perusahaan-perusahaan garam yang nakal, seperti juga pernah diungkapkan Menteri KKP bahwa ada tujuh perusahaan garam yang perlu diawasi. Bila selama ini garam lokal kurang terserap, itu karena perilaku curang para importir garam industri.

Pada bagian lain, Junaedi juga mengometari kinerja PT. Garam di Jawa Timur yang belum optimal. PT. Garam yang mendapat alokasi PMN sebesar Rp300 miliar, ditugasi menyerap garam rakyat. Namun, anggota dewan

ini menyayangkan pernyataan Dirut PT. Garam yang kerap berbeda-beda. Awalnya, sang dirut ingin membeli garam rakyat Rp650 per kg. Lalu, pada pertemuan NU se-Madura, dia berjanji lagi mau membeli garam rakyat Rp750 per kg.

“Statemen itu hanya pencitraan. Sampai sekarang PT. Garam belum melakukan penyerapan. Menurut saya tidak logis PT. Garam ingin membeli dengan harga Rp750 per kg, karena hasilnya nanti mau dijual ke mana. Apalagi, PT. Garam ini bukan produsen garam olahan, melainkan hanya di produksi garam. Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan core bisnisnya,” ungkapnya. (mh) foto: husen/parle/iw

Kerja Sama Intelijen dengan Turki Perlu Ditingkatkan

Komisi I DPR RI menilai pemerintah patut memprioritaskan kerja sama di bidang intelijen dengan Turki. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadang langkah sejumlah pihak di tanah air yang ingin bergabung menjadi pasukan asing organisasi teroris ISIS dan menjadikan negara Turki sebagai tempat transit.

“Turki ini kan tempat transit, jadi berkepentingan untuk bekerja sama dengan negara lain yang warga negaranya hendak masuk ke Suriah bergabung dengan ISIS. Jadi BIN perlu bekerja sama lebih intensif sebagai upaya *counter terrorism*,” kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq usai menerima Presiden Turki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Ia menyebut dalam kesempatan kunjungan kerja komisi pertahanan ke Turki, pembicaraan soal ini pernah disampaikan kepada kepala intelijen dari negara yang juga tergabung dalam



Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq

organisasi pertahanan NATO ini. Sebagai sesama negara yang mayoritas berpenduduk muslim jelas isu ISIS dan *foreign fighters* menjadi perhatian.

Sebagai negara yang terdekat dengan lokasi konflik, Turki saat ini juga memerlukan dukungan terutama menghadapi pengungsi yang terus bertambah sampai mencapai 1,9 juta orang. Indonesia bersama negara lain menurut politisi Fraksi PKS ini perlu membahas isu ini termasuk upaya pe-

nyelesaian konflik.

Pada bagian lain Mahfudz menambahkan dalam pertemuan yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto tersebut, Presiden Turki juga menawarkan kerja sama untuk mengembangkan industri perkapalan. “Iya industri perkapalan mereka sudah maju, jadi tawaran kerja sama baik kapal perang maupun niaga patut dikaji, bisa *joint production* serta transfer teknologi,” tutur dia.

Mahfudz yang dalam pertemuan itu didampingi Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya sepakat meningkatkan kerja sama parlemen dua negara untuk mengkampanyekan reformasi PBB. “Konstelasi kekuatan politik dunia sekarang sudah berubah, jadi reformasi PBB serta pengaturan ulang Dewan Keamanan perlu dilakukan sesuai konfigurasi dunia saat ini,” pungkasnya. (iky) foto: denus/parle/iw

Komisi VII Kritisi Leletnya Pembangunan PLTU Pulang Pisau

Komisi VII DPR RI mempertanyakan keterlambatan penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Proyek yang terletak di desa

Buntoi dengan luas 60 hektar ini tertunda sampai 2,5 tahun karena faktor kesalahan desain.

“Ini merupakan keterlambatan yang luar biasa dan ini jadi perhatian Komisi

VII, apalagi ini karena aspek desain yang kurang jeli memperhitungkan kondisi lahan. Keterlambatan tidak akan terjadi kalau desain diperhitungkan dengan matang,” kata Mulyadi



Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi

minta desain dilakukan perusahaan konsultan lain, apabila ada kesalahan mudah untuk meminta pertanggungjawaban,” tekan dia.

Mulyadi yang juga Wakil Ketua Komisi VII menambahkan masalah ketersediaan listrik menjadi perhatian komisi yang membidangi masalah energi ini. Ia juga menyoroti pembangunan ini juga menjadi bagian dari pembangunan pembangkit listrik 10.000 -20.000 MW serta program 35.000 MW yang telah dicanangkan pemerintah.

Pada bagian lain ia juga mengingatkan PT PLN agar tidak sembarangan dalam menetapkan kerja sama dengan kontraktor. Menurutnya sejumlah masukan yang dihimpun, hasil akhir proyek kelistrikan yang digarap kontraktor Tiongkok banyak yang bermasalah. *(spy/iky)*

Ketua Tim Kunker Komisi VII saat meninjau lokasi, Selasa (4/8/15).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini semakin kecewa ketika mendapat informasi, pelaksana desain adalah

anak perusahaan PT PLN. Baginya sulit untuk meminta pertanggungjawaban apabila permasalahan kelancaran proyek terkait anak perusahaan sendiri.

“Sulit meminta pertanggungjawaban secara hukum. Ke depan kita

Komisi X Pantau Sekolah-Sekolah Rusak di NTT



Wakil Ketua Komisi X Nuroji



Salah satu fokus kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah meninjau sekolah-sekolah rusak. Sekolah-sekolah yang ditinjau adalah jenjang pendidikan seolah dasar (SD), SMP, SMA maupun SMK baik rusak ringan maupun rusak berat.

Tim Kunker Komisi X terdiri 12 orang anggota lintas fraksi dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji dari Fraksi Ge-

rindra, dijadwalkan akan bertolak ke NTT pada Minggu (13/8) hingga Selasa (11/8).

Selama di Provinsi ini, Tim Komisi X akan melakukan peninjauan lapangan ke Badan Perpustakaan Provinsi, bidang pemuda dan olah raga serta mengunjungi obyek wisata, cagar budaya unggulan dan industri kreatif.

Tim Kunker Komisi X juga menggelar pertemuan dengan Gubernur be-

serta Muspida, Pimpinan DPRD, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kadis Pemuda dan Olah Raga serta Kepala Badan Arsip Daerah.

Sedangkan dari kalangan universitas, Tim Komisi X menggelar pertemuan dengan Rektor Undana, Kopertis, Perguruan Tinggi Swasta, Politeknik termasuk Sekolah Tinggi Pariwisata. *(mp) foto: andri, ist/parle/iw*



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menerima 6 orang Delegasi Rosatom dari Rusia, perihal penawaran kerjasama pemanfaatan energi nuklir, Kamis (06/08)
Foto : Jaka/Parle/IW



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti meninjau lokasi Kantin Risanti didampingi Ketua Dharma Wanita Pusat Setjen DPR Titik Djuned, Senin (3/08/)
Foto : Jaka/Parle/IW



Acara Dialektika Demokrasi mendiskusikan “Rekomendasi Bawaslu Perpanjang Pilkada” menghadirkan Rambe Kamarulzaman dan Yandri Susanto dari Komisi II DPR RI, Siti Zuhro peneliti LIPI dan Raja Sapto Oktohari ekonom muda di Ruang Wartawan DPR RI, Kamis (06/08) Foto : Rizka/Parle/IW